

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era modern, kompetensi teknologi informasi (TI) merupakan kompetensi yang sangat vital bagi keberlangsungan suatu kegiatan organisasi. Di semua organisasi, besar atau kecil, memiliki tim TI yang kompeten sangat penting untuk menjaga aktivitas tetap berjalan secara efektif. Pemanfaatan teknologi informasi pada era modern ini menjadi tantangan bagi setiap organisasi.

Tantangan pemanfaatan TI tidak lepas pada organisasi sektor publik. Meningkatnya volume kegiatan yang diiringi oleh keterbatasan sumber daya menyebabkan pemanfaatan TI sebagai solusi terbaik bagi organisasi publik saat ini. Selain itu, penggunaan TI sebagai sarana penyelenggaraan pemerintah dianggap dapat meningkatkan akuntabilitas terhadap publik. Seiring dengan hal tersebut, beberapa tahun terakhir telah gencar diupayakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TI di Indonesia. Salah satu *brand* yang sering diperbincangkan adalah *E-government*.

Penggunaan sistem berbasis TI pada sektor publik tentunya menimbulkan peralihan pada proses bisnis. Salah satu konsekuensi peralihan model bisnis dari sistem tradisional yang prosesnya cenderung manual menjadi sistem yang terkomputerisasi adalah perubahan jenis dan bentuk data. Data-data dan *file* yang sebelumnya berupa kertas-kertas atau bentuk fisik lainnya telah beralih menjadi data-data elektronik.

Salah satu pihak yang sangat terpengaruh atas perubahan model bisnis di sektor publik tersebut adalah auditor sektor publik. Audit merupakan kegiatan

pengumpulan dan pengevaluasian bukti yang berupa data-data. Maka dari itu, perubahan jenis dan bentuk data tentulah berpengaruh pada proses audit. Penugasan yang dihadapi auditor selanjutnya akan mendorong auditor untuk semakin memberdayakan seluruh perangkat sistem informasi teknologi elektronik yang tersedia, baik dalam komunikasi maupun pengambilan keputusan antar tim audit, melakukan prosedur analitis, dan prosedur audit lainnya yang memerlukan solusi dengan perangkat lunak (Antonius, 2010).

Coderre (2005) dalam Agung (2015) menyatakan bahwa kewajiban untuk mematuhi berbagai ketentuan perundang-undangan, tuntutan untuk meningkatkan kualitas, perkembangan teknologi, dan perubahan dalam lingkungan bisnis mendorong auditor untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasannya. Guna mengatasi tantangan tersebut, perlu ada pendekatan baru dalam pelaksanaan audit yang sifatnya *sustainable*, produktif, serta memenuhi aspek efektivitas biaya-manfaat.

Keterbatasan yang ada pada pendekatan audit tradisional tersebut mendorong munculnya pendekatan teknik audit berbantuan komputer (TABK). TABK merupakan perangkat komputer yang melakukan ekstraksi dan analisis dari aplikasi komputer (Braun dan Davis, 2003). TABK memungkinkan auditor untuk meningkatkan produktivitas dan fungsi auditnya. Misalnya, TABK dapat mengotomatisasi pengujian yang sebelumnya dilakukan secara manual dan akan menghemat waktu berjam-jam. Teknik ini memungkinkan audit untuk menguji 100% data dari populasi ketimbang menguji sampel, untuk itu implementasi TABK dapat meningkatkan reliabilitas kesimpulan yang diambil dari suatu kegiatan pengujian (Curtis dan Payne, 2008).

Sebagai salah satu unit audit intern sektor publik, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (selanjutnya disebut Inspektorat Jenderal) menyadari akan kebutuhan TABK dalam kegiatan pengawasannya. Pemanfaatan sistem berbasis TI secara masif pada proses bisnis Kementerian Keuangan meninggalkan *database* elektronik yang besar dan kompleks. Maka untuk melakukan pengawasan atas sistem perpajakan yang komprehensif, sistem kepabeanan dan cukai yang terintegrasi secara nasional, sistem perbendaharaan yang berbasis *enterprise resource planning* (ERP), serta sistem-sistem lain yang bergantung pada pemrosesan dengan teknologi informasi, pendekatan audit tradisional seperti *paper-based audit* sudah tidak efektif lagi dilakukan.

Salah satu bentuk legitimasi penerapan TABK di Inspektorat Jenderal, pada 2014 disusun Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Audit Berbantuan Komputer. Penyusunan pedoman tersebut merupakan legitimasi dari penerapan TABK yang sudah ada sebelumnya namun belum memiliki payung hukum yang sah. Walaupun pedoman tersebut disahkan pada tahun 2014, upaya penerapan TABK sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan penetapan kompetensi TABK sebagai kompetensi dasar dan diwajibkan bagi seluruh auditor di Inspektorat Jenderal untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan TABK tingkat dasar. Selain itu inisiasi penerapan TABK juga ditandai dengan pengadaan aplikasi ACL oleh Inspektorat Jenderal yang menjadi sarana bagi para auditor untuk mengimplementasikan kemampuan TABK yang sebelumnya diampu.

ACL merupakan audit *software* khusus didesain untuk melakukan analisa data elektronik suatu perusahaan dan membantu menyiapkan laporan audit secara mudah dan interaktif (Siti Elda dan Mario, 2014). Braun dan Davis (2003) dalam

survei studi empiris terkait penggunaan ACL pada auditor sektor publik menemukan bahwa meskipun sebagian besar memiliki persepsi potensi manfaat yang besar dari penggunaan ACL, mereka tidak memiliki kompetensi teknik yang baik untuk menggunakan ACL. Menghadapi tantangan tersebut, maka dalam pendidikan dan pelatihan yang diwajibkan bagi pegawai Inspektorat Jenderal, aplikasi ACL merupakan salah satu perangkat utama dalam kurikulumnya.

Meskipun kompetensi telah diwajibkan, aplikasi telah disediakan, dan pedoman telah disusun, penerapan TABK masih belum merata ke setiap individu auditor. Pada kegiatan pengawasan sehari-hari, penggunaan ACL terbatas pada beberapa auditor saja. Hal ini tidak senada dengan sasaran Inspektorat Jenderal yang dituangkan pada Roadmap Implementasi TABK yang menargetkan peningkatan kompetensi TABK dari tingkat dasar hingga lanjutan di setiap bidang.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk menganalisis persepsi penggunaan ACL bagi auditor di Inspektorat Jenderal. Dengan menggunakan *technology acceptance model* yang dipopulerkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1989, maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Penggunaan Audit Command Language (ACL) di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) berpengaruh langsung terhadap niat perilaku menggunakan ACL (*behavioral intention to use*)?

2. Apakah persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) berpengaruh tidak langsung melalui sikap atas perilaku (*attitude towards using*) terhadap niat perilaku menggunakan ACL (*behavioral intention to use*)?
3. Apakah persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) berpengaruh tidak langsung melalui sikap atas perilaku (*attitude towards using*) terhadap niat perilaku menggunakan ACL (*behavioral intention to use*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh langsung antara persepsi kegunaan terhadap niat perilaku menggunakan ACL.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh tidak langsung antara persepsi kegunaan terhadap niat perilaku menggunakan ACL.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh tidak langsung antara persepsi kemudahan penggunaan terhadap niat perilaku menggunakan ACL.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Aspek Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu penelitian dalam bidang audit, khususnya audit berbasis komputer.

2. Aspek Praktis

- a. Menjadi informasi yang berguna bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam mengoptimalkan penerapan teknik audit berbantuan komputer (TABK).

- b. Sebagai sumbangan pemikiran ataupun ilmu pengetahuan kepada instansi terkait, masyarakat, maupun mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab satu adalah pendahuluan yang diawali dengan pembahasan latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan suatu fakta maupun fenomena yang diangkat oleh penulis sehingga menjadi dasar tujuan penelitian ini. Selanjutnya dipaparkan mengenai rumusan masalah yang menjabarkan fokus permasalahan secara konkret. Permasalahan tersebut menjadi fokus penelitian pada penelitian ini. Berdasarkan penjabaran rumusan masalah, maka pada bab ini dijabarkan tujuan dari penelitian. Setelah itu penulis memaparkan mengenai manfaat yang diharapkan atas penyusunan penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dari aspek teoretis dan aspek praktis. Bab satu diakhiri dengan penjabaran sistematika penulisan yang secara umum menjelaskan konten karya tulis ini.

Bab dua merupakan studi pustaka yang berisi deskripsi dan penjelasan teori-teori dan fakta yang relevan dengan penelitian ini. Adapun teori-teori yang dipaparkan adalah seputar objek penelitian hingga metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dalam metode penelitiannya. Selanjutnya penulis menerangkan mengenai kerangka pemikiran yang menjelaskan paradigma penelitian ini secara lugas. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka diterangkan mengenai hipotesis-hipotesis penelitian.

Bab tiga berisi tentang metode penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai desain penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain desain penelitian, pada bab

ini juga dijabarkan hal-hal terkait metodologi penelitian seperti penentuan populasi dan sampel disertai teknik samplingnya. Selanjutnya diterangkan mengenai variabel-variabel penelitian yang ada disertai dengan definisi operasionalnya. Setelah itu penulis menjabarkan mengenai sumber data dan metode pengumpulan data. Pada bagian akhir penulis menjelaskan tentang metode-metode pengujian dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.

Bab empat berisikan mengenai data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasannya. Kemudian di bab lima penulis menerangkan mengenai kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.

